

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN RKAT 2016
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS
DI INDONESIA**

TIM PENGUSUL

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (0019046503)
Anggota : Eri Agustia, S.H., LL.M. (0010085302)
: Dr. Ghantham Anand, S.H., M.Kn. (9907147561)
: Fanny Lexia (031414253080)

**Maret – Oktober 2016
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HKAT 2016

Judul Penelitian	: Unifikasi dalam Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia	
Kode/Nama Rumpun Ilmu	: Hukum Perdata/ Hukum Waris/ Hukum Acara Perdata	
Ketua Panitia	:	
a. Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.
b. NIDN	:	0019044503
c. Jabatan Fungsional	:	Guru Besar
d. Program Studi	:	Hukum Perdata
e. Nomor HP	:	08123087172
f. Alamat e-mail	:	yudha_hermoko@indoo.co.id
Anggota Panitia	:	
a. Nama Lengkap	:	Erni Agustia, S.H., LL.M.
b. NIDN	:	0610088302
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor
Anggota Panitia	:	
a. Nama Lengkap	:	Dr. Ghanshem Anand, S.H., M.Kn.
b. NIDN	:	9907147561
c. Jabatan Fungsional	:	-
Anggota Panitia	:	
a. Nama Lengkap	:	Fanny Livia
b. NIDN	:	031414295090
Biaya Penelitian	: - Dana Internal PT	Rp. 20.000.000,00

Surabaya, 3 Oktober 2016



Prof. Dr. Drs. Abul Shamsul, S.H., M.H.
NIP.196705201992301002

Ketua Panitia

Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.
NIP.196504191990320001

RINGKASAN

Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 *Indische Statuutregeling* (IS) dan 153 IS yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan. Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda nampaknya masih tidak bisa ditinggalkan dalam penerbitan aturan-aturan kependataan pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah terkait penerbitan Keterangan Waris. Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat (1) C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: Penduduk golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris; Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat; Untuk WNI keturunan Timur Asing (India, Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal tersebut dikarenakan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda.

Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi

suatu keadaan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, negara Republik Indonesia yang telah merdeka lebih dari 70 tahun, dan penjajahan secara fisik dari bangsa lain sudah tidak lagi, tapi semangat dan jiwa untuk melanjutkan nilai dan visi penjajahan masih tetap berlangsung sampai sekarang ini, yaitu masih menerapkan ketentuan yang berbeda dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris menurut etnis dan golongan, padahal Pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan juga Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan Indonesia hanya mengenal Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), oleh sebab itu seyogianya segala jenis peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya diskriminasi tidak perlu lagi diterapkan atau dengan kata lain perlu segera dilakukan perubahan atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata kunci: unifikasi, pembuktian, keterangan waris, kewarganegaraan

PERNYATAAN LUARAN PENELITIAN

Dengan ini saya menandatangani bahwa

JUDUL PENELITIAN : UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WAJIB DI INDONESIA

NAMA PENELITI : Prof. Dr. A. Yudha Heroko, S.H., M.H., Erni Agustini, S.H., LL.M. dan
Dr. Ghanshar Anand, S.H., M.Ko.

TAHUN ANGGARAN : 2010

Penelitian tersebut akan menghasilkan luaran sebagai berikut:

NO.		JENIS LUARAN		KETERANGAN	
1.		Publikasi ilmiah	Internasional	Nama Jurnal	
				Peneliti	
				ISSN	
				Website	
				Status artikel	
			Nasional terakreditasi	Nama Jurnal	Ins Disisi Hukum
				Peneliti	Fakultas Hukum Universitas Jember Indonesia
				ISSN	
				Website	
				Status artikel	
			Lokal	Nama Jurnal	
				Peneliti	
				ISSN	
				Website	
				Status artikel	
2.		Sebagai pemastikan dalam pertemuan bersih	Internasional	Nama Seminar	
				Pengelolaan Waktu, tempat	
			Nasional	Nama Seminar	
				Pengelolaan Waktu, tempat	
3.		Prosiding	Internasional	Nama Prosiding	
				Peneliti	
				ISSN	
				Alamat	
			Nasional	Nama Prosiding	
				Peneliti	
				ISSN	
				Alamat	
4.		Buku Aja		Judul	
				Peneliti	
				ISSN	
5.		Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan			
6.		(lainnya)			

Surabaya, 24 Oktober 2010
Ketua Peneliti

(Prof. Dr. Agus Yudha Heroko, S.H., M.H.)
NIP. 195041011981021001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Bab I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang Masalah	4
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kausalan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Akademis (Teoritis)	10
1.5.2. Manfaat Praktis	10
1.6. Rencana Luaran	10
Bab II. Tinjauan Pustaka	11
II.1. Keterangan Waris	11
II.2. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia	12
II.3. Unsur-unsur Pewarisan	13
Bab III. Metode Penelitian	18
Bab IV. Kewenangan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Notaris dan Batal Harta Peninggalan dalam Menyerahkan Keterangan Waris	20
Bab V. Pejabat/Institusi yang Satu-Satunya Berwenang Membuat Keterangan Waris	26
Bab VI. Penutup	39
1. Kesimpulan	39
2. Saran	40

Daftar Bacaan

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam ragam suku ataupun etnis. Negara Republik Indonesia tidaklah dihuni dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dari golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut dibertakutkan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* dan 143 *Indische Staatsregeling* yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan. Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda sampai-sampai masih bisa ditengokkan dalam penentuan aturan-aturan kepemerintahan pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah terkait pemberian Kewarganegaraan WNI.

Kondisi yang dihadapi masyarakat di dalam praktik berkaitan dengan kewenangan pembuatan Keterangan Hak Warga (KHW) cukup membingungkan karena didasarkan atas perbedaan golongan dan agama. Perbedaan golongan penduduk tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bangsa Indonesia saat ini komposisi warga negaranya tidak berdasarkan etnis lagi, dan etnis yang ada di negara kita merupakan kekayaan budaya nasional, hal ini diatur dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), yang Menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Salah satu hal yang sangat berdasar untuk diambil dari Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, yaitu mengenai siapa Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan tersebut, bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diadopsi dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan Pasal 2

tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Demikian pula Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) menegaskan bahwa, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak didasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di bumi Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri. Dengan demikian segala bentuk aturan hukum yang berlaku didasarkan pada etnis tertentu atau berlaku untuk etnis tertentu sudah tidak berlaku lagi.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965/CERD*) pada tanggal 25 Mei 1969 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1969.

Dalam Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi tersebut, antara lain :

1. Konvensi mengatur larangan untuk menciptakan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga Negara maupun bukan warga negara.
2. Negara wajib melaksanakan kebijakan antidiskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama untuk menggunakan hak-haknya.

Kunci dari penentuan siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris berada di kewarganegaraan waris. Yang dimaksud dengan kewarganegaraan waris itu adalah untuk membuktikan seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran hak atas waris atau tanah, maka berdasarkan Pasal 111 ayat (1) C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997), disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang dibentaknya terdiri dari:

1. Wasiat dari pewaris; atau

2. Putusan pengadilan; atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan; atau
4. Surat keterangan waris

Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang, yang hanya menerangkan siapa saja ahli waris dari seseorang yang telah meninggal. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris, namun demikian siapa yang berwenang membuat keterangan waris.

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat (1) C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk penduduk golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris;
2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (dieshkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat;
3. Untuk WNI keturunan Tionghoa Asing (India, Amb), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP)

Untuk pembagian waris secara Islam, sebelum tahun 1990-an dibuat oleh Pengadilan Agama dalam bentuk fatwa waris, namun demikian pada awal tahun 1990 ada edaran dari Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Agama untuk membuat Fatwa waris untuk WNI yang beragama Islam, dalam hal tidak terjadi sengketa waris¹. Sejak itulah maka yang berwenang untuk membuat keterangan waris bagi pewaris yang beragama Islam pun cukup dibuat di bawah tangan dengan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.

Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oleh Notaris maupun yang dibuat oleh BHP, keterangan waris yang dibuat di bawah tangan dan disahkan lurah dan camat tersebut tidak menetapkan berapa jumlah atau bagian dan para ahli waris. Bahkan sering terjadi, keterangan waris tersebut dibuat tanpa adanya pencatatan sama sekali, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah ahli waris dari seorang pewaris. Misalnya, seorang pewaris yang memiliki isteri lebih dari 1 dapat membuat sendiri-sendiri

¹ Ima Dextia, <http://bit.ly/1M5AGUQ>, diakses tanggal 18 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.

keterangan warisnya, sehingga masing-masing menjual sendiri harta ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadinya sengketa waris karena keterangan waris yang lengkap tidak terdapat. Akibat sering adanya gugatan masalah keterangan waris yang keliru, akhir-akhir ini Lurah dan Camat rumah-rumah mendak wesi surat Pernyataan para ahli waris dimana Lurah yang seharusnya melaksanakan pernyataan ahli waris tersebut. Jadi kalimat yang seharusnya berbunyi Lurah "menyatakan dan membenarkan" dan pada bagian Camat kalimatnya adalah "mengukuhkan" (pernyataan lurah tersebut), diganti menjadi "mengetahui" atau "menyatakan benar ahli waris X adalah warga kami". Artinya disini Lurah dan Camat posisinya hanya mendaftarkan awal yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh ahli waris. Disinilah awal "kekeliruan" tersebut.

Problematis lain dalam pembuatan surat keterangan waris untuk pribadi adalah tidak dilakukannya pengecekan wasiat terlebih dahulu oleh para ahli waris sebelum dibuatnya pernyataan ahli waris secara di bawah tangan. Oleh karena itu, jika pewaris ternyata pernah membuat wasiat secara diam-diam maupun terang-terangan di hadapan Notaris, namun tidak memberitahunya kepada ahli warisnya atau orang lain, maka wasiat tersebut tidak akan pernah diketahui oleh ahli waris atau pihak lain yang nantinya akan melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan. Bisa terjadi tanah yang dijual oleh ahli waris seperti keterangan waris sebenarnya telah diwasiatkan kepada orang lain sama sekali (jika ahli waris menurut ketentuan undang-undang). Sehingga pembuatan berdasarkan surat keterangan waris untuk pribadi hampir selalu berdasarkan undang-undang tanpa mempertanyakan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris. Kondisi tersebut yang kadang menyurut Notaris/PPAT yang membuat akta peralihan hak warisnya dari seorang ahli waris kepada orang yang nama-namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris menjadi turut terpacat dalam kasus-kasus peralihan hak karena wasiat, karena posisi Notaris benar-benar tergantung pada kejujuran para ahli waris yang hadir dan melakukan peralihan hak. Demikian pula Perkawinan antar etnis bukanlah suatu hal yang tabu ataupun dibenci pada saat ini. Dan hasil perkawinan antar etnis, memberikan hasil anak-anak dengan darah campuran antar etnis dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan demikian timbul suatu keadaan yang tidak jelas mengenai bagaimana menentukan golongan penduduk anak tersebut, terutama apabila anak tersebut menjadi ahli waris dan orang tuanya dan ingin membuat surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Selain itu, hingga saat ini tidak ada ketentuan secara tegas dan khusus yang mengatur Notaris dalam membuat surat keterangan waris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN) dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN Perubahan), tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat dalam membuat surat

keterangan waris, demikian juga dalam *Reglement op Het Notarisch Ambt in Nederlands Indië* (Statistiek Tahun 1860 Nomor 3 atau dikenal disebut Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJJN), tidak pula ditemukan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris. Sampai saat ini, notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan kebiasaan yang diikuti dari notaris Belanda.

Suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan. Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan disetujui atau disahkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat, atau Notaris berdasarkan Pasal 15.

UUJN juncto UUJN Pendidikan, mempunyai kewenangan membuat akta bukan membuat surat dan Notaris bukan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan. Begitu pula dengan Balai Harta Peninggalan yang secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau menjadi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau penetapan (*besluiting*) yang bersifat kolektif, final dan individual sesuai dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²

Setiap jabatan apapun mempunyai wewenang tersendiri, setiap wewenang haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan atau pejabat tersebut. Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melibatkan suatu persoalan hukum, hal tersebut dikarenakan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Kelurahan/Kepada Desa, Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam menertibkan Keterangan Waris;
2. Pejabat/Institusi yang satu-satunya berwenang membuat Keterangan Waris.

² Habib Adja, *Bernas-Bernas Peraturan di Undang-Notaris dan PPAT*, Mardika Maju, Bandung, 2012, h. 34. (Selanjutnya disebut Habib Adja 1).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dasar kewenangan Kepala Kelurahan/Kepada Desa, Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam membuat Keterangan Waris.
2. Mengkaji dan menemukan pejabat/institusi yang satu-satunya mempunyai kewenangan membuat Keterangan Waris.

1.4. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai hukum keluarga maupun hukum waris memang telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku teks, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi, namun penelitian yang secara khusus sebagaimana judul penelitian ini berbeda dan belum pernah ditulis sebelum. Adapun penelitian mengenai hukum keluarga maupun hukum waris dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Komer Andasasmita, dalam bentuk makalah dengan judul Hukum Harta Perkawinan dan Waris, disampaikan dalam pertemuan Ikatan Notaris Indonesia, Komisarlat Jawa Barat, tanggal 5 Februari 1987;
2. R. Soelajo Prawotoharidjopran Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (*Personen en Familie Recht*), diterbitkan Airlangga University Press, Surabaya, 1991
3. Herlien Boediono, dalam bentuk makalah dengan judul Menuju Keterangan Waris yang Uniform, Makalah pertemuan berkala para anggota Ikatan Notaris Indonesia Daerah Surabaya, tanggal 16 Juni 2007;
4. Habib Aji, dalam bentuk buku dengan judul Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris), diterbitkan Manda Maju, 2005.

Penelitian-penelitian diatas adalah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, karena pada penelitian ini akan dikaji mengenai institusi/pejabat yang mempunyai kewenangan membuat keterangan waris. Permasalahan ini secara substansi belum pernah ditulis dalam penelitian lain yang setara, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk kepentingan akademis (teoritis dan kepentingan praktis), sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Akademis (Teoritis)

Untuk kepentingan akademis teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keperdataan dan sekaligus bahan untuk revisi terkait prosedur perundang-undangan di bidang hukum keluarga.

1.5.2. Manfaat Praktis

Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah untuk memperbaiki ketertarikan di bidang hukum keperdataan khususnya di bidang hukum waris, yang akan berdampak terhadap perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

II.1. Keterangan Waris

Dalam ketiga sistem pewarisan yang dimiliki Indonesia, masing-masing menjelaskan bahwa suatu proses pewarisan terjadi karena adanya kematian dan dengan sendirinya karena kematian harta waris pewaris beralih kepada ahli waris. Dalam hukum waris BW, dijelaskan:

Pasal 830 BW:

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"

Pasal 833 BW:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ..."

Dalam hukum waris Islam terdapat prinsip pewarisan hanya karena kematian dan prinsip iktari:

- Prinsip pewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan pewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.
- Prinsip iktari, adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Demikian pula pada hukum waris adat, yang prinsip utama dari sistem pewarisannya adalah harus ada yang meninggal dunia. Soejono Soekanto mengatakan, bahwa bila seorang meninggal maka ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta.² Soejono Soekanto memberi penjelasan terhadap pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa pengalihan harta dalam keluarga sendiri hanyalah bersifat sementara, itu pun biasanya hanya terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal atau parental untuk anak laki-laki yang sudah dewasa tetapi tetap bukan merupakan peristiwa pemberian harta warisan.

Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu sarana yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula hartawaris yang tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencatatan dan setiap pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.

²Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 282.

Untuk membuktikan seseorang memang benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses persilhan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan waris. Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang menandatangani tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia. Dibutuhkannya keterangan waris dalam suatu proses persilhan hak karena pewarisan merupakan, persilhan terhadap harta waris yang berasal dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, namun masih dipedukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.

Menurut Habib Adja:

"Salah satu upaya untuk mengakhiri atau menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris, yaitu dengan menjadikan Notaris sebagai satu-satunya lembaga atau instansi yang berwenang untuk membuatnya. Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka Notaris sebagai suatu lembaga yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tanpa berdasarkan kepada golongan penduduk atau etnis, agama apapun, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, dan sekarang ini Notaris telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang akan melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa melihat etnis apapun."⁴

II.2. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Di masa pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa itu, penggolongan penduduk melalui Instruksi Staatsregeling (IS) dalam Pasal 131 dan kemudian Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Bumiputera/Pribumi, golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Perbedaan pada golongan tersebut membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupun diam-diam diadakan ataupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tatanan hukum kolonial yang berakut atau smatur serta substansinya. Berdasarkan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian Alinea Pertama, maka segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Melalui Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/UN/12/ 1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan perbedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya persamaan persamaan nilai di antara sesama bangsa

⁴ Habib Adja, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 13. (Selanjutnya disebut Habib Adja II).

Indonesia. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dinyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam "peraturan-peraturan lama" dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus maka ketentuan di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tenggara.

Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi Presiden Kabinet tersebut, namun di dalam praktiknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari. Instruksi Presiden Nomor 31/AMN/1211966 tersebut juga menyatakan, bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan lain perkataan, dari Pasal 66 UU Perkawinan juncto Instruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengenai sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam UU Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan BW bagi sebagian penduduk Indonesia.⁶

Hukum waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena salah satu masalah mewarisi yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekerabatan sedaruk karena perkawinan.⁷ Hukum Waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (berbhinneka Tunggal Ika) yang tidak dapat dipisahkan agar terjadi unifikasi.⁸

Pemikiran ke arah unifikasi di bidang hukum waris telah dimulai sejak 1960 sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kelempaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 11/MPRS/1960 mengenai perlu adanya undang-undang tentang Hukum Waris, namun sampai saat ini hukum waris nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia belum terbentuk. Dalam pengaturan kawarisan masih terjadi pluralisme, yaitu terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

3.3. Unsur-unsur Pewarisan

Pewarisan terjadi apabila unsur-unsurnya dipenuhi, yaitu: 1) adanya seseorang yang meninggal dunia; 2) adanya harta peninggalan/ harta warisan; 3) adanya ahli waris yang

⁶ Sunarjati Hartono, *Dasar Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 44.

⁷ Pito, *Hukum Waris (Hukum Kekeruhan)*, Dibahas dan dikaji oleh P. Tenger, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 8.

⁸ Erwin Suparman, *Hukum Persepsi*, Refika Aditama, 2005, h. 128.

berhak atas harta peringgalannya warisan tersebut. Jika salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidaklah berlangsung pewarisan.

Menurut hukum waris BW, sebagaimana diatur di dalam Pasal 830 BW, yang menyatakan: *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"*. Tanpa adanya peristiwa kematian seseorang, maka tidaklah terjadi pewarisan. Orang yang meninggal dunia disebut sebagai pewaris dan dengan demikian meninggalkan harta kekayaannya kepada orang yang masih hidup. Harta kekayaan yang ditinggalkan atau disebut dengan harta warisan merupakan salah satu unsur yang mutlak ada dalam pewarisan. Harta benda yang ditinggalkan atau disebut juga dengan harta warisan merupakan salah satu unsur yang mutlak ada dalam pewarisan menurut BW. Pengertian harta kekayaan di dalam hukum waris BW, disini berarti seluruh kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris. Kemudian yang dimaksud dengan (ahli) waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan. Syarat sebagai (ahli) waris menurut hukum waris perdata barat adalah: 1) adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin; 2) sudah ada saat warisan jatuh meluangi; 3) dan tidak mengawangi (tidak patut mewaris).

Oleh karena di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum waris, maka syarat dan kriteria ahli waris juga berbeda-beda jika ditinjau berdasarkan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata barat. Berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian dalam hukum adat waris, pewarisan tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat dengan bentuk kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan dalam hukum adat yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental/bilateral.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta memberikan gambaran sistematis berpikir sehingga penelitian diartikan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian yang hendak dilakukan adalah berupa penelitian hukum. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan mengkaji suatu masalah hukum tertentu dan kemudian dicari pemecahan atas masalah yang telah dirumuskan tersebut secara preskriptif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penulisan normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dan statut yang ada. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.⁸ Pater Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁹ Selanjutnya berdasarkan pandangan Enid Campbell, dan Terry Hutchinson, dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan prinsip-prinsip mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹¹ Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ruang lingkup akademis¹² yang bertujuan untuk memberikan prinsip-prinsip mengenai "Unifikasi dalam Pembuatan Keterangan Warta di Indonesia".

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut

⁸ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media, Jakarta, 2007, A.35.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Campbell menyatakan "In his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem". Lihat Enid Campbell et al., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988, h.271.

diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan rantainya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris. Melalui pendekatan perundang-undangan rantainya akan mencari hakikat dan menungkap hakikat dalam pembuatan keterangan wasis dan pejabat yang membuatnya. Penelitian ini mengkaji aturan hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan hukum perdata, hukum waris dan hukum acara perdata. Di sini fungsi dogmatik hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memaparkan, menganalisis, menelaah/menelaah dan menginterpretasi hukum yang berlaku, sedangkan teori hukum untuk menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum atas hasil penelusuran prinsip hukum yang ditemukan.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menganalisis hakikat pembuatan keterangan wasis. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengkaji konsep, mengemukakan konsep apa yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai hukum keluarga yang dapat mengakibatkan adanya pembahasan khususnya hukum perdata.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat filosofi yang berkaitan dengan pembuatan keterangan wasis dan pelaksanaan hukum waris di Indonesia.

Setelah didapat titik temu dari hasil penggabungan ketiga pendekatan tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga terjadi proses evaluasi ilmiah dari hal-hal yang ditemukan sekaligus menjawab masalah hukum yang ada.

Bab IV

Kewenangan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan Keterangan Waris

Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) dan Pasal 109 RR (*Regenings Reglement*) mengenai penggolongan penduduk sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, meliputi:

Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan Belanda; semua orang Jepang; semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda atau orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang esensialnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia-Belanda.

2. Golongan Bumiputera, meliputi :

Semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera; Golongan penduduk lainnya yang telah melepaskan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara menikah atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.

3. Golongan Timur Asing, meliputi :

Meraka yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, seperti Arab, India.

Pasal 131 IS dan 75 RR mengadakan 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana tersebut di atas, dan ditegaskan sebagai berikut :

1. Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifikasi, yaitu ditetapkan dalam suatu kitab undang-undang. Untuk golongan bangsa Eropa harus diambil (diadaptasi) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (atau konkordansi).
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing jika ternyata berten kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seluruhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama; untuk lainnya harus ditetapkan aturan-aturan yang berlaku di

salangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.

3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, penundukkan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

Sebelum hukum untuk orang Indonesia dibuat di dalam undang-undang, maka bagi mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, ialah hukum adat asli orang Indonesia.¹³

Penggolongan penduduk seperti itu dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut¹⁴ sebenarnya sudah tidak ada lagi, tapi dalam kenyataannya masih diberlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris seperti tercantum dalam:¹⁵

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1966, nomor Dpt/12/63/12/66 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.¹⁶
2. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Golongan Timur Asing (bukan

¹³ R. Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1975, h. 11.

¹⁴ Melalui Instruksi Presiden/Kabinet Nomor 314/1966/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan perbedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya persamaan perlakuan rasial di antara sesama bangsa Indonesia.

¹⁵ Mengenai Pembuktian sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas sebenarnya tidak berlaku umum, tapi hanya untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau pertanahan yang berlaku pada Kantor Pendaftaran Tanah (pada waktu itu) atau pada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang sehingga (menurut kedua aturan hukum tersebut) etnis atau golongan penduduk harus diperhatikan, tapi kedua aturan hukum tersebut sudah akan menjadi aturan hukum yang umum dalam pembuktian sebagai ahli waris yang masih diskriminatif. Dengan memperhatikan Notaris sebagai satu-satunya pejabat/institusi yang berwenang membuat bukti ahli waris dalam bentuk surat akta pihak (Akta Keterangan Ahli Waris), maka telah mengakhiri semua diskriminasi dalam pembuktian bukti ahli waris tersebut.

¹⁶ Mengenai Pembuktian Kewarganegaraan sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Pribumi (Bumi-putern), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat di bawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Dalam praktik ketentuan pembuktian (sural bukt) sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya masih harus berdasarkan etnis masih dipertahankan sampai hari ini. Tindakan seperti itu masih dipertahankan dan dilakukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, Perbankan. Misalnya Kantor Pertanahan/BN hanya akan menerima peralihan hak atas sebidang tanah yang berasal dari warisan kepada para ahli warisnya, jika bukti ahli warisnya berdasarkan etnis atau golongan penduduk, di kalangan Perbankan hanya akan mencairkan deposito karena pemiliknya (depasan) meninggal, jika para ahli waris membawa bukti sebagai ahli warisnya berdasarkan etnis yang bersangkutan, dalam dunia Notaris/PPAT untuk transaksi tertentu, misalnya penjualan sebidang tanah yang berasal dari warisan, Notaris/PPAT akan meminta bukti sebagai ahli waris sesuai dengan etnisnya, sehingga jika bukti warisnya tidak sesuai dengan etnis dan institusi yang membuatnya, jangan berharap Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional dan Notaris/PPAT akan melayaninya. Padahal kantor Pertanahan/Badan Pertanahan tidak membuat arsip sertifikat atau peralihan hak dicatat tersendiri berdasarkan etnisitas.

Menurut Habib Adja¹⁷:

"Saat ini tidak mudah untuk menentukan bukti ahli waris harus berdasarkan etnisnya, baik dari segi fisik maupun nama. bahkan dalam praktik memperhatikan implementasi ketiga penggolongan penduduk tersebut untuk pembuatan dokumen atau bukti sebagai ahli waris, seperti dagelan, bahkan lebih lucu dari petawak yang sebenarnya, misalnya dengan memperhatikan fisik, kulitnya putih atau hitam, matanya sipit atau belo, namanya berbau etnis tertentu. Iyainya melacak silsilah keturunan. Padahal memperhatikan fisik seperti itu bisa menyudahkan, jika ternyata mereka yang menghadapi bukan murni dari etnis tertentu, tapi merupakan percampuran etnis melalui perkawinan. Sebagai contoh nyata di salah satu daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ada penduduknya berambut pirang, bermata biru atau coklat, kulit putih (seperti orang Eropa), tapi mereka berbicara Bahasa Aceh, berdasarkan penelitian ternyata mereka adalah keturunan dari prajurit Portugis yang pernah singgah ke daerah tersebut. Meskipun mereka berbeda dengan orang Aceh lainnya, mereka tetap mengatakan dan disebut orang Aceh

¹⁷ Habib Adja, *Op. Cit.*, h. 8.

(asli). Dan perkawinan antar etnis atau suku di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia, dan sudah tentu anak keturunannya tidak mewariskan dirinya mutlak keturunan salah satu orang tua kandungnya, tapi merupakan campuran dari ibu-bapak kandungnya dari etnis yang berbeda, dan Warga Negara Indonesia sendiri yang berasal dari etnis apapun telah pula melakukan perkawinan dengan bangsa lain yang bukan Warga Negara Indonesia. Dengan kenyataan seperti itu, sudah tidak tepat lagi jika kita masih menganut penggolongan penduduk seperti itu¹⁴.

Dengan telah terjadinya percampuran etnis melalui perkawinan, sangat sulit untuk menafikan bahwa mereka yang termasuk dalam ketiga golongan tersebut betul etnis berdarah Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing dan pribumi. Sesuai dengan perkembangan zaman sudah tentu penggolongan penduduk seperti itu harus sudah ditinggalkan sebagaimana dikahandaki oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu bagaimana jadinya jika bukti ahli waris masih harus berdasarkan etnis orang yang bersangkutan.

Pembastaraan ketentuan semacam itu ternyata melanggar atau melestarikan salah satu bentuk diskriminasi di negara kita ini. Padahal Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Amendemennya tidak membuat stratifikasi atau penggolongan penduduk berdasarkan etnis. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis sekarang ini hanya merupakan romantisme sejarah saja. Dan suatu akal nanti keragaman etnis di Indonesia hanya tinggal sejarah, karena dalam rentang waktu yang demikian panjang akan terjadi percampuran etnis melalui perkawinan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa adanya perbedaan tidakkan hukum seperti itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi.¹⁵

Indonesia telah meratifikasi *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965/CERD*) pada tanggal 26 Mei 1999 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi tersebut, antara lain:

1. Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga Negara maupun bukan warga Negara.

¹⁴ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2. Negara wajib untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan mencegah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama untuk menggunakan hak-haknya.

Bangsa Indonesia saat ini komposisi warga negaranya tidak berdasarkan etnis lagi, dan etnis yang ada di Negara kita merupakan kekayaan budaya nasional, hal ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan¹⁹ yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958. Salah satu hal yang sangat mendasar untuk dicermati dari undang-undang Kewarganegaraan tersebut, yaitu mengenal siapa Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan²⁰, bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diizinkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak didasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di bumi Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri. Dengan demikian segala bentuk aturan hukum yang berlaku didasarkan pada etnis tertentu atau berlaku untuk etnis tertentu sudah tidak berlaku lagi. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diizinkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Adanya perbedaan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan kepada golongan penduduk seperti itu merupakan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), maka dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya yang berbeda harus segera diakhiri, disamping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya perbedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis tersebut.

¹⁹ Kalahkan Undang-undang Kewarganegaraan tersebut telah menempatkan bangsa Indonesia untuk berdiri dan memandang satu dengan yang lainnya pada kedudukan yang sama, dan setara, sehingga etnis atau suku yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa, dan tidak perlu diperlembungkan lagi, tapi kita akan dan kita bisa, kembangkan untuk kemajuan bersama.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan), menegaskan bahwa, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diizinkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Behwa dalam pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari siapa tidak perlu dikaitkan dengan hukum waris yang berlaku untuk yang bersangkutan, tapi hanya untuk membuktikan seseorang ahli waris dari siapa. Hal ini berkaitan masih adanya pluralisme hukum waris di negara kita. Pembentukan Hukum Waris atau Kewarisan yang bersifat nasional artinya berlaku untuk semua penduduk Indonesia tanpa berdasarkan kepada etnis dan agama tertentu akan sangat sulit dilakukan. Misalnya bagi mereka yang beragama Islam sudah pasti akan menolak jika ada hukum waris nasional yang menysihkan hukum waris Islam. Melaksanakan hukum waris Islam bagi mereka yang beragama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai seorang Muslim. Tapi meskipun demikian menurut saya Hukum Waris Nasional tersebut tetap diperlukan, tapi bukan untuk menysihkan hukum-hukum waris yang selama ini berlaku, tapi hanya merupakan ketentuan yang sifatnya fakultatif, artinya jika di antara para ahli waris ada yang tidak setuju dengan pengaturan pembagian hak/bagian waris masing-masing menurut hukum yang dianutnya, atau jika masalah kewarisan diajukan ke pengadilan, maka akan diberlakukan atau pembagian hak/bagian hak warisnya berdasarkan Hukum Warisan Nasional tersebut.

Salah satu upaya untuk mengakhiri atau menghilangkan diskriminasi dalam pembuktian bukti sebagai ahli waris, yaitu diperlukan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya sesuai dengan aturan hukum yang ada.

BAB V

Pejabat/Institusi yang Satu-Satunya Berwenang Membuat Keterangan Waris

Hak Perdata seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia atau disebut oleh suatu putusan pengadilan untuk hak-hak perdata tertentu,²¹ dan membukukan seseorang sebagai ahli waris oleh siapa merupakan salah satu implementasi dari hak perdata tersebut di atas. Berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1988, nomor Dpt/12/63/12/88 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (forma) buku waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat buku sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan hukum yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atau negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab timur seperti itu harus segera kita tinggalkan dan kita inggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa kita yang sudah merdeka.

Kedua bentuk formal buku ahli waris dan institusinya, yaitu:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang bumiputera Islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan.²²
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

²¹ Menurut Pasal 1 dan BW, bahwa (1) Perakusatan hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kewarganegaraan; (2) Tidak satu hukuman pun yang mengakibatkan kematiannya perdata atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan.

²² Dalam berbagai perubahan perundang-undangan/buku-buku untuk hal yang sama disebut pula Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Waris (Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3/1997), Surat Keterangan Hak Waris (Da Siang Dja, Media Notariat, Tahun VI Januari - April 1991, Nomor 18-19), Keterangan Waris (Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serta-serta Praktis Notaris, Ichlas Bani Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 251), Keterangan Hak Warisan, I Gede Purwaka, Keterangan Hak Warisan Yang Dibuat Oleh Notaris, Program Studi Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989), Surat Keterangan Warisan (Surat Dirjen Agraria nomor Dpt 712/63/12/88, tanggal 20 Desember 1988), Surat Keterangan Waris, Komar Andasari, Hukum Harta Perakusatan dan Waris, Balai Notaris Indonesia, Komisarial Deoah Jawa Barat, 1987.

3. Golongan Priayi (Bumputara) berdasarkan SKW yang dibuat di bawah tangan, persaksi, oleh para ahli waris sendiri dan di-ketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Kedua bentuk formal (surat) bukti sebagai ahli waris dan instansi yang membuatnya perlu untuk dikaji lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan aturan hukum yang sekarang ini berlaku.²²

Surat Keterangan Waris (SKW) yang selama ini yang dibuat oleh Notaris merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Kalau kita mau membaca Kamus Hukum Bahasa Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai *Verklaring Van Erfrecht*, terutama arti *Verklaring*. Bahwa *Verklaring* atau *Verklaard* mempunyai 2 (dua) arti, yang pertama berarti *Menenangkan* atau *Menjelaskan*, *Keterangan*, dan yang kedua berarti *Menyatakan*, *Mendeklarasikan* atau *Menegaskan*.²³ *Verklaring* dalam arti *menenangkan* merupakan arti secara umum, yang dalam Bahasa Inggris disebut *information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum ataupun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* dalam arti sebagai *menyatakan* berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan seperti ini dalam Bahasa Inggris disebut *Declaration*. Dan dengan ini seperti itulah *Verklaring Van Erfrecht* harus dibaca sebagai Pernyataan atau Keterangan dari para ahli waris. Sebagai Ahli Waris yang berupa Pernyataan (pihak/pada pihak) Sebagai Ahli Waris. Sehingga jika ada yang tidak setuju dengan isi akta Pernyataan atau Keterangan Sebagai Ahli Waris silahkan mengajukan keberatan kepada para ahli waris yang bersangkutan. Sama halnya jika ada pihak berkeberatan dengan isi akta Pernyataan atau Keterangan Sebagai Ahli Waris silahkan ajukan keberatan kepada yang bersangkutan (para ahli waris), bukan kepada Notaris.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (P/JN) tidak akan ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat Surat Keterangan Waris (SKW), demikian pula dengan UJUN tidak mengaturnya. Dalam *Wet op het Notarisambt* (1842) Pasal 38 ayat (2) dimasukkan ketentuan bahwa Notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht*. Ketika *Wet op het Notarisambt* (1842) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) ke dalam *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesië (Nederlands Indie)* 1860 (kemudian ditorehkan menjadi P/JN) ketentuan Notaris berwenang membuat

²² Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1993, Nomor 26/TJADA-AGU/HU/VI/1993, diagaskan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan penetapan bahwa waris.

²³ Hoeb Adje II, *Op. Cit.*, h. 18.

verklaring van erfrecht tidak dimasukkan. Dengan demikian Notaris membuat verklaring van erfrecht hanya merupakan kebiasaan saja (kebiasaan yang berasal dari para Notaris Belanda yang pernah praktek di Indonesia yang kemudian diikuti oleh para Notaris Indonesia) tanpa diketahui dasar hukumnya. Menurut Tan Thong Kie, bahwa pembuatan keterangan waris oleh seorang Notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang Indonesia. Lebih lanjut Tan Thong Kie²¹ menyarankan bahwa agar kebiasaan tersebut dijadikan dasar suatu undang-undang yang baru.²² Meskipun Notaris di Indonesia sekarang ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UJUN dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN Perubahan), mengenai Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Waris tetap tidak diatur. Notaris hanya diberikan kewenangan membuat Akta Wasiat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 932-937 BW, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Pusat Daftar Wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UJUN Perubahan. Hal ini berbeda dengan *Wet op het Notarisambt* (1999) dalam Pasal 47 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat verklaring van erfrecht yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.²³

Menurut I Gede Purwaka²⁴, apabila kita lihat pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ternyata tidak dijumpai adanya pasal yang mengatur mengenai ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan hak mewaris yang harus dibuat di hadapan/oleh Notaris. Yang ada adalah ketentuan yang berhubungan dengan pembagian dan pemisahan harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1074 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan harus dibuat di hadapan Notaris.

Dengan demikian selama ini Surat Keterangan Waris untuk etnis/golongan penduduk Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam)

²¹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 362.

²² *Ibid.*

²³ (1) Een verklaring van erfrecht kan uitsluitend worden opgemaakt (Keterangan Harta Waris dapat dibuat di bawah tangan. Ketentuan Pasal-pasal 20, 40 ayat (1), 41, 42 dan 45 berbeda).

(2) De in vorige leden bedoelde verklaringen worden voor wat betreft de uitsluitende bewijskracht en de bevoegdheid van de daarin gereleerde verichthende en waarmakende van de notaris als een authentieke akte aangemerkt, tenzij ingevolge een der in de vorige leden vermelde bepalingen anderszins is voorzien. De notaris is verplicht een exemplaar van de verklaring in zijn protocol op te nemen (Keterangan sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya, bertalian dengan kekuatan pembuktian sahiah dan kekuatan pembuktian dan tindakan-tindakan yang terkait dengan keterangan tersebut serta pencatatan yang dilakukan notaris, akan dianggap sebagai akta otentik, terkecuali terdapat hal-hal yang dinyatakan tersebut berdasarkan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Notaris wajib menyimpan satu exemplar dari keterangan tersebut di dalam protokolnya). Habis Adje S., *Op. Cit.*, h. 21

²⁴ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, Program Spesialis Notariat dan Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, lama tahun, h. 17.

tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali.²⁹ Tapi tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh kewenangan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris seperti tersebut di atas, bahkan tindakan Notaris seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris.³⁰

Wewenang Balai Harta Peninggalan (BHP) mempunyai wewenang untuk membuat Surat Keterangan Warisan bagi penduduk Indonesia keturunan timur asing, yaitu keturunan Arab, India, Pakistan, dan lain-lainnya (kecuali Tionghoa) berdasarkan pada ayat 1, Pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters (Sbl, 1916 No. 517).

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan hak perdata seluruh manusia. Sehingga hanya dirinya sendiri yang berhak untuk membuktikannya. Bahwa BHP secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dan mereka yang berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (*beschikking*) yang bersifat konkret, final dan individual (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dan dalam surat semacam itu ada kehendak (*willenwring*) dari pejabat yang bersangkutan,

²⁹ Jika dilihat lebih lanjut dimana hieri apa dasar hukum kewenangan Notaris dapat membuat SKW untuk golongan tertentu seperti tersebut, ternyata bukan dari Peraturan Jabatan Notaris (PUN), artinya PUN tidak pernah mengatur mengenai kewenangan Notaris dapat membuat SKW untuk golongan tertentu. Menurut Tan Thong Kie, bahwa kita tidak akan menemu peraturan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat SKW (lihat Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 351). Selanjutnya menurut Tan Thong Kie dalam teks asli *Wet op het Notariewest* tahun 1942 pada Pasal 38 ayat 2 ada kalimat vertaling *van rechts*. Tapi kemudian pasal tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda dimasukkan ke dalam *Wet Reglement op het Notariewest in Indonesië* atau PUN tahun 1991 menjadi Pasal 35. Tetapi ternyata kalimat vertaling *van rechts* dalam Pasal 35 PUN tidak dimasukkan. Sehingga berdasarkan penafsiran Pasal 35 ini sebenarnya tidak ada dasar kewenangan Notaris Indonesia untuk membuat SKW.

³⁰ Pada tahun 1913 di negeri Belanda dikeluarkan de *Wet op de Grondboeken der Nationale Schuld* yang merupakan Buku Peruntangan Nasional yang berlaku di Belanda. Dan Buku Peruntangan Nasional tersebut dengan asas Konkordansi diberlakukan di daerah-daerah jajahan Belanda, termasuk di Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) Buku Peruntangan Nasional tersebut menyebutkan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian penanda ditukikan. Kemudian Pasal 14 ayat (2) angka 3, menyebutkan bahwa keterangan waris dibuat oleh seorang Notaris. Ada yang dibuat dari keterangan itu harus dikuatkan *in original* (lihat Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, h. 353). Jika dilihat Buku Peruntangan Nasional tersebut mengatur tentang peredaran rakyat pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, bukan kewenangan membuat SKW ada pada Notaris, tapi hanya menyebutkan SKW dibuat oleh Notaris. Dengan kata lain dasar hukum atau sumber kewenangan Notaris (Indonesia) untuk membuat SKW tidak ada, tapi yang hanya kebiasaan notaris-notaris sebelumnya yang kemudian diikuti begitu saja oleh notaris-notaris berikutnya sampai sekarang.

sehingga jika mereka yang menerima surat dari Pejabat TUN merasa berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperkokan surat tersebut. Sehingga Surat Keterangan waris yang dibuat BHP terjadi permasalahan, apakah harus dilaksanakan di pengadilan negeri atau di pengadilan tata usaha negara. Jika di Pengadilan Negeri yang menjadi objeknya yaitu para ahli waris sendiri, sedangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya surat. Oleh karena itu jika bukti sebagai ahli waris yang merupakan bukti pendata, kemudian dibuat oleh Pejabat TUN yang tunduk kepada Hukum Administrasi merupakan kesalahan/kelaparan yang harus segera didefinisikan, artinya BHP tidak perlu mempunyai wewenang untuk membuat bukti sebagai ahli waris.

Bahwa pembuatan SKW yang didasarkan pada tempat tinggal (alamat) terakhir pewaris meninggal dunia. Dalam kenyataan ada masalah yang sering timbul, yaitu jika alamat terakhir pewaris tidak sama dengan para ahli warisnya. Contoh A (suami) dan B (istri), mereka bertempat tinggal terakhir di Kota Surabaya, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng. Mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu C bertempat tinggal sama dengan orang tuanya, D bertempat tinggal di Kelurahan Peneloh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan E bertempat tinggal di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. A meninggal dunia di tempat tinggal terakhirnya di Kelurahan Ngagol, Kecamatan Wonorejo, Kota Surabaya. Kemudian ahli waris A, yaitu B, C, D, dan E membuat SKW dan dibawa ke Kelurahan Gubeng. Selanjutnya Kelurahan menandatangani dan menandatangani SKW tersebut, dan Kelurahan memberikan catatan bahwa hanya A, B, dan C saja yang dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh Kelurahan, sedangkan atas keberadaan D dan E Kelurahan tidak bertanggung jawab karena bukan penduduk atau tidak tercatat sebagai penduduk Kelurahan Airlangga, begitu juga Camat memberikan catatan yang sama sebagaimana Kelurahan, yaitu D dan E tidak tercatat sebagai penduduk Kecamatan Gubeng. Untuk memperoleh pengakuan yang jelas kemudian D dan E membawa SKW tersebut ke kelurahan dan kecamatan masing-masing untuk ditandatangani dan diregistrasi oleh kelurahan dan kecamatan di mana D dan E bertempat tinggal. Dalam hal ini sudah pasti bahwa Kelurahan Peneloh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya tidak akan menandatangani/mengakui dan menandatangani SKW tersebut dengan alasan Kelurahan dan Kecamatan tidak mengenal A orang tua D dan E atau A tidak tercatat sebagai penduduk/warga Kelurahan Peneloh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

Masalah lainnya yang juga tidak diberikan penyelesaian yang tepat menurut hukum, jika mereka (suami-istri) yang berbeda etnis menikah, misalnya suami (pribumi) dan istri (Tionghoa), jika suami atau istrinya meninggal dunia, dan instansi manakah bukti sebagai ahli waris harus dibuat? Jika suami meninggal dunia, maka Notaris tidak akan membuat

bukti keterangan waris, karena suami (prbumi), demikian pula jika istri meninggal dunia, maka lurah dan camat tidak akan memberikan pengesahannya, karena istri (Tionghoa), hal yang sama jika mereka menikah dengan golongan Timur Asing, misalnya Arab, maka BHP pun tidak akan memberikan bukti keterangan waris yang dimaksud, karena mereka mereka menikah bukan sesama etnisnya.

Hal tersebut akan semakin rumit, jika ternyata tidak ada satu ahli waris pun yang alamatnya (kelurahan dan kecamatan) yang sama dengan pewaris. Dan akan lebih rumit lagi jika beda provinsi, apalagi beda negara. Keadaan seperti itu telah menimbulkan diskriminasi dalam pembuatan SKW, dan dalam praktek secara fisik akan dilihat dari etnis mana masyarakat yang membuat atau yang membutuhkan SKW. Tapi sekarang ini pengamatan secara fisik tidak mudah lagi untuk menentukan kepada siapa dan oleh siapa SKW dibuat. Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi percampuran etnis melalui perkawinan, sehingga sangat menyulitkan dalam pembuatan SKW tersebut hanya berdasarkan di-diri etnis atau fisik.

SKW seperti tersebut di atas, jika akan dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan perdatahan atau pertanahan sering dibolak oleh instansi yang bersangkutan, dengan alasan, karena ahli waris tidak dibenarkan/ditanyakan oleh kelurahan dan kecamatan seluruhnya, tapi hanya sebagian saja.

Dalam praktik untuk mengatasi masalah tersebut di atas, sering dibuat SKW untuk pewaris dan ahli waris yang bertempat tinggal sama dengan pewaris saja, dengan menghilangkan atau tidak mencantumkan ahli waris lainnya yang tempat tinggalnya berbeda dengan pewaris. Sudah tentu hal ini dapat dikategorikan menghilangkan adalah ahli waris yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Sebaliknya jika kelurahan dan kecamatan ikut mengetahui dan membenarkan SKW seperti tersebut di atas, padahal di kelurahan dan di kecamatan ada nama penduduk yang tidak diketahui atau tercatat dalam buku penduduk kelurahan atau kecamatan, artinya kelurahan dan kecamatan membenarkan semua subjek (semua nama) yang tercantum dalam SKW tersebut meskipun mereka bertempat tinggal tidak pada satu kecamatan dan kelurahan yang sama dengan pewaris. Jika hal ini dilakukan dapat memberikan akibat hukum yang lain pula.

Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya tidak akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memerlukan pembuktian sebagai ahli waris, juga kepada kelurahan dan kecamatan sangat rentan untuk berada pada posisi yang terduduk jika SKW seperti tersebut di atas bermasalah.

Walaupun, atau tugas Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk turut serta menyaksikan/mengetahui dan membenarkan kemudian menandatangani, suatu bukti ahli

wana untuk golongan penduduk tertentu di Indonesia,³¹ yaitu berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), lampiran 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Ketetapan Wilayah dan Pembukuan Kewangnegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 31 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³²

³¹ Kewenangan Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk menandatangani dan membenarkan/mengesahkan/mengukuhkan SKW di bawah tangan seperti tersebut di atas, harus dilihat dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada waktu itu. Pada awalnya yang menandatangani pertanahan yaitu Jawatan Pendaftaran Tanah. Jawatan ini berada di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden nomor 100 tahun 1957, tanggal 12 September 1957 jawatan tersebut dipindahkan ke dalam lingkungan Kementerian Agraria. Selanjutnya Jawatan Pendaftaran Tanah tersebut menjadi Direktorat Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 20 tahun 1998 dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang merupakan peningkatan status dari Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditegaskan bahwa BPN adalah lembaga nondepartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan tugas menangani bidang pertanahan secara nasional. Berdasarkan Pasal 2 Keppres tersebut, bahwa tugas BPN membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundangan yang lain yang meliputi pengukuran, penggabungan, pengakuan dan pemberian tanah, pengukuran hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian tugas dan fungsi yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Agraria beralih kepada BPN. Ketika bidang pertanahan atau agraria masih berada dalam Departemen Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk membandikan tugas tertentu kepada instansi lainnya yang masih dalam kewenangan Menteri Dalam Negeri, misalnya dengan memberikan kewenangan tertentu kepada instansi bawahannya, seperti kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat. Maka sejak berlakunya Keppres tersebut, Lurah/Kepala Desa dan Camat sudah tidak lagi mempunyai kewenangan lagi untuk menandatangani dan membenarkan/mengesahkan/mengukuhkan SKW di bawah tangan, karena yang menjadi dasar kewenangan untuk Lurah/Kepala Desa dan Camat sudah tidak ada lagi, artinya Kepala Desa/Lurah dan Camat hanya berada dalam kewenangan Departemen Dalam Negeri dan bukan dibawah BPN. Bahkan jika ternyata Lurah/Kepala Desa dan Camat masih melakukannya, maka Lurah/Kepala Desa dan Camat tersebut telah melakukan perbuatan di luar wewenang. Habis Asja I, Op. Cit. h. 28.

³² Kewenangan Camat seperti tersebut di atas, tampak sama ketika secara ex officio (karena jabatannya) Camat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - (lihat Pasal 4 Pw. Manag No. 10 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) untuk Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 25 Maret 1962, nomor SK.5Kw/1962, dan menurut Pasal 5 ayat (2) dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa untuk daerah yang belum cukup PPAT, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat tertentu (Camat atau Kepala Desa atau Kepala Kantor Pertanahan) sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus. Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa PPAT Sementara dan PPAT Khusus dibebaskan oleh Menteri setelah tidak lagi memegang jabatan tersebut. Karena Camat/Lurah/Kepala Desa sekarang ini berada dalam ruang lingkup Departemen Dalam Negeri, dan bidang pertanahan berada dalam ruang lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Camat tidak lagi secara ex officio sebagai PPAT. Jika Camat ingin bertindak sebagai PPAT, maka Camat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada BPN kotakabupaten selanjutnya untuk ditunjuk sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus (lihat Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Bahwa tund tentunya Kepala Desa/Lurah/Camat untuk membenarkan/menyaksikan/mengetahui dan menandatangani suatu bukti ahli waris dibawah tangan dalam bentuk Surat Keterangan (Pernyataan) Waris menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu (1) Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tangannya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut. Atau (2) Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah formalitas (bentuk) Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut.

Atas permasalahan yang pertama, jika yang dibenarkan/disaksikan /diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tangannya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut, yang berarti membenarkan/menyaksikan/mengetahui bahwa mereka adalah penduduk desa/lurah/camat yang bersangkutan, artinya mereka bertempat tinggal pada satu desa/kelurahan dan kecamatan yang sama. Untuk hal seperti ini Kepala Desa/Lurah dan Camat harus bertanggung jawab sepenuhnya akan keberadaan mereka, bahwa mereka berdomisili (bertempat tinggal) pada desa/lurah dan kecamatan yang sama. Akan menimbulkan masalah jika ternyata Kepala Desa/Lurah dan Camat tund serta membenarkan/ mengetahui/ menyaksikan dan menandatangani Surat Keterangan (Pernyataan) Waris untuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tidak bertempat tinggal (berdomisil) pada satu Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda provinsi ataupun beda negara. Oleh karena itu jika ternyata Kepala Desa/Lurah dan Camat masih tetap tund serta membenarkan/ mengetahui/menyaksikan dan menandatangani Surat Keterangan (Pernyataan) Waris untuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris yang tidak bertempat tinggal (berdomisil) pada satu Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda provinsi ataupun beda negara, maka tindakan Kepala Desa/Lurah dan camat dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana memberikan Keterangan Palsu.²⁰

Atas permasalahan yang kedua, jika yang dibenarkan/disaksikan/ diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah formalitas (bentuk) Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut, pertanyaannya apakah Kepala Desa/Lurah dan Camat mempunyai wewenang untuk membenarkan/menyaksikan/mengetahui Surat Keterangan (Pernyataan) Waris yang

Nasional tentang Ketertiban Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

²⁰ Dalam Harian Surya (Semarang, 10 Juni 2007, h. 23), ada seorang Lurah di kecamatan Kota Surabaya diminta keterangan oleh kepolisian setempat, karena telah ikut membenarkan/ menyaksikan Surat Keterangan Waris (SKW) dibawah tangan, padahal yang tercantum namanya di dalam SKW tersebut ialah pembantu keluarga cowok, yang tidak rata telah sekian lama menjadi pembantu mengurus/membuat harta keluarga pewaris, harta pewaris jalah menjadi hak waris dari anak-anak pewaris.

menyatakan bukti nyata. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, akan dihubungkan dengan wewenang Kepala Desa/Lurah dan Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap jabatan apapun di negara kita ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Apabila berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang Pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) telah ditentukan wewenang Camat, Lurah dan Desa. Wewenang Camat diatur dalam Pasal 225 ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah memiliki wewenang (tugas) sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketertarikan dan ketertarikan umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewenangan Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. memelihara ketertarikan dan ketertarikan masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memantapkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah membaca dengan cermat berbagai ketentuan di atas, kita tidak akan menemukan wewenang Camat, Lurah dan Desa untuk turut serta mengetahui, membenarkan/menyaksikan dan menandatangani SKW sebagai tuntutan dan ilirir Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Wases dan Pembukuan Kewarganegaraan dan Pasal 111 ay at (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sekarang ini pertualan atau tindakan Camat, Lurah, Desa mengetahui, membenarkan dan menandatangani SKW seperti sudah merupakan pertualan di luar wewenang Camat, Lurah dan Desa berdasarkan Pasal 126-127 dan 206-207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian Pasal 126-127 dan 206-207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata Camat, Lurah dan juga Desa melaksanakan wewenang pemerintahan. Dengan demikian Camat, Lurah dan Desa berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi (Negara) dengan posisi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam kedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah tentu berhak untuk melakukan suatu tindakan administrasi, seperti mengeluarkan Surat Keputusan yang sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu sangat lucu jika Bukti Ahli Waris yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata harus dibenarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Baik Hukum Perdata dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dalam Hukum Perdata jika kita tidak puas dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum, sedangkan jika kita tidak puas dengan suatu putusan atau tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sangat menyimpang terlalu jauh jika Camat, Lurah dan Desa diharuskan membenarkan, mengetahui/menyzekikan dan menandatangani suatu bukti perdata seperti SKW. Sehingga jika kita akan mengajukan gugatan untuk membatalkan SKW seperti itu, di mana kita akan menempatkan posisi Camat, Lurah dan Desa. Apakah dalam ruang lingkup Hukum Perdata atau dalam ruang lingkup Hukum Administrasi, apakah digugat ke pengadilan umum atau ke pengadilan tata usaha negara.

Jika berdasarkan uraian tersebut di atas Camat, Lurah dan Desa seyogyanya tidak berwenang lagi untuk membenarkan, mengetahui/mengetahui dan menandatangani SKW di bawah tangan. Disamping tidak ada wewenangnya berdasarkan Pasal 126-127 dan 206-207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga berada pada ruang lingkup hukum yang berbeda. Camat, Lurah dan Desa dalam melaksanakan tugas jabatannya tunduk pada kaidah-kaidah Hukum Administrasi dalam hal ini sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan SKW perbuatan warga negara secara perorangan berdasarkan Hukum Perdata.

Suatu hal yang sangat aneh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ternyata makna persatuan tidak terwujud dalam pemberian bukti sebagai ahli waris, yaitu masih adanya diskriminasi atau perbedaan :

1. Diseuaikan atau berdasarkan dengan etnik (suku)as) Warga Negara Indonesia.
2. Dalam bentuk formal surat.
3. Pejabat yang membuatnya (atau di hadapan, disaksikan, dibenarkan oleh pejabat (pemerintah) tertentu atau Notaris). Kenyataan seperti tersebut harus diakhiri apapun alasannya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka. Sehingga bukti waris tidak perlu dibedakan atau

berdasarkan etnis tertentu, tidak perlu dibedakan bentuk formal suratnya dan juga tidak perlu dibedakan pejabat yang membuatnya.

Hasil diskusi dengan Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dijen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yenni Dewi, S.H., M.H. pada tanggal 25 Agustus 2018 diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hingga saat ini pembuatan surat keterangan waris masih bergantung pada golongan atau etnis ahli waris yang pejabat pembuatnya pun masih berbeda-beda;
2. Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dan BHP, keterangan waris yang dibuat secara di bawah tangan dengan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat tersebut tidak menetapkan berapa jumlah atau bagian dari pers ahli waris, bahkan sering terjadi, keterangan waris tersebut dibuat tanpa penelitian sama sekali sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah ahli warisnya. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadi sengketa waris karena tumpang tindih tersebut;
3. Problematika selanjutnya dalam pembuatan surat keterangan waris untuk pribumi adalah tidak dilakukannya pengecekan wasiat terlebih dahulu oleh para ahli waris sebelum dibuatnya pernyataan ahli waris secara di bawah tangan. Oleh karena itu, jika si pewaris ternyata pernah membuat wasiat secara diam-diam maupun wasing-terangan di hadapan Notaris, namun tidak memberitahukannya kepada ahli warisnya atau orang lain, maka wasiat tersebut tidak akan pernah diketahui oleh ahli waris atau pihak lain yang nantinya akan melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris. Bisa jadi tanah yang dijual oleh ahli waris sesuai keterangan waris sebenarnya sudah diwariskan kepada orang lain sama sekali (di luar ahli waris menurut undang-undang). Sehingga pewarisan berdasarkan surat keterangan waris untuk pribumi hampir selalu berdasarkan undang-undang tanpa memperlanyakan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris. Kondisi tersebut yang kadang menyeret Notaris/PPAT yang membuat akta penstahan hak warisnya dari seorang ahli waris kepada orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli waris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam kasus-kasus peralihan hak karena warisan. Karena pasal Notaris benar-benar bergantung pada kejujuran para ahli waris yang hadir dan melakukan pemindahan hak;
4. Perlu dilakukan pertemuan dan pembahasan mengenai pembuatan waris ini, yang melibatkan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Badan

Perencanaan Nasional, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Pertimpunan Advokat Indonesia (Peradi);

Sebagai bentuk unifikasi pembuatan keterangan waris, maka seharusnya pejabat atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat Keterangan Waris adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Para ahli waris dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum, yang kemudian pengadilan akan menetapkan ahli waris setelah dilakukan pembuktian sesuai alat-alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pengecekan ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan ada tidaknya wasiat dari pewaris. Hal ini dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris maupun mencegah konflik bagi orang-orang yang sekadar mengaku sebagai ahli waris dapat memperoleh hak atas suatu wasiat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1989, Nomor Dpt/12/89/12/89 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Cepes Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masih terdapat pluslume dalam ketentuan pembuktian sebagai ahli waris. Untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (khusus orang Arab yang beragama Islam), pembuktian sebagai ahli waris didasarkan pada Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), dibuktikan sebagai ahli waris berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Untuk orang Indonesia asli (Bumi Putera) didasarkan pada SKW oleh para ahli waris sendiri yang dibuat di bawah tangan, bermaterai, yang kemudian diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan lampir tanggal terakhir pewaris.
2. Dalam rangka membentuk suatu unifikasi hukum waris dalam hal pembuatan keterangan waris sebagai dasar pembuktian ahli waris, satu-satunya institusi yang seyogyanya memiliki kewenangan adalah Pengadilan. Dalam hal ini hanya dibedakan menjadi Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan umum bagi mereka yang beragama non Islam. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengadilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Peradilan Umum. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengadilan setelah para ahli waris mengajukan permohonan dan setelah dilakukan pembuktian sesuai alat-alat bukti yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan pengecekan ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia untuk memastikan ada bidadanya wasiat dari pewaris. Hal ini dapat memberikan perlindungan kepada ahli waris maupun mencegah konflik bagi orang-orang yang sekedar mengaku sebagai ahli waris dapat memperoleh hak atas suatu warisan.

B. Saran

1. Penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hanya diberikan menjadi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Untuk itu ketentuan yang masih bersifat pluralisme mengenai kewenangan institusi yang menerbitkan Surat Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk (Timur Asing Tionghoa, Timur Asing non Tionghoa, dan Bumi Putera) yang dapat menimbulkan diskriminasi penduduk, seyogyanya dihapuskan dan tidak berlaku lagi di Indonesia.
2. Berdasarkan kajian mengenai institusi/pejabat satu-satunya yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris di Indonesia adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Umum untuk selain Beragama Islam. Untuk memberikan legitimasi dan dasar hukum atas kewenangan tersebut, ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Waris hendaknya diuangkan dalam undang-undang Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adja, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- _____, *Bemas-Bemas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Campbell, Erid et al., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988
- Harsono, Sunarjati, *Dasar Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2007
- Prijo, *Hukum Waris (Buku Kesatu)*, Diterjemahkan oleh F. Tengker, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1961
- Subekti, R., *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1975
- Supaman, *Hukum Persewarisan*, Refika Aditama, 2005
- Tan Theng Kie, *Studi Notarial, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichder Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

Makalah

- I-Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, Program Spesialis Notariat dan Perantara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanpa tahun

Website

- Irina Devita, <http://bit.ly/J5AGVQ> diakses tanggal 18 Februari 2016, pukul 19.00 WIB

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Burgerlijk Wetboek*, *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Lampiran 4. CV PENELITIAN

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Prof. Dr. Agus Yudha Hermawan, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan/Fungsional	Guru Besar
4.	NP	100004191090021001
5.	NIDN	0019040503
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 27 Januari 1961
7.	E-mail	yudha_hurmer@yahoo.co.id
8.	HP	08123087172
9.	Alamat Kerja	Jalan Darmawijaya Dalam, Surabaya
10.	No. Telepon/Fax	(031) 5023151 / (031) 5020454
11.	Mata Kuliah/dikampu	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Perikatan
		3. Hukum Kontrak
		4. Teknik Perancangan Kontrak

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Kontrak
Tahun Masuk-Lulus	1985-1989	1995-1998	1999-2007
Judul Tugas Akhir	Berk Garansi Dalam Perjanjian Kredit Bank	Kedudukan Hak Tanggungan Dalam Mendukung Kegiatan Perbankan Nasional	Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Murtalena Pohan, S.H.	Prof. Dr. M. Shazri, S.H., M.S.	Prof. Dr. Rudi Prasetya, S.H. / Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.	2015	Problematisa Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata Indonesia	RKAT	10.000.000
2.	2012	Hukum Perdata (Buku Ajar)	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.	2015	Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	RKAT	13.000.000
2.	2010	Pemasyarakatan Hukum Wars dan Sekolah Hukum dalam Perspektif Adat, Islam, dan BW		
3.	2014	Prinsip Perancangan Kontrak Kerjasama Kemitraan UMKM	RKAT	12.000.000

E. Publikasi Dalam Jurnal Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pengertian Asas-Asas Hukum Kontrak	Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Kependidikan	Intans Publishing, Malang, 2014 (ISSN 978-602-1042- 33-7)
2.	Kontributor Naskah dalam Buku "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia"	Buku "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia"	Lakobang Grafika, Yogyakarta, 2013

F. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat/Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-
2.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian dosen pemula.

Surabaya, 24 Oktober 2018
Salam Peneliti

(Prof. Dr. Agus Yudha Hermanto, S.H., M.H.)

Anggota Penulis**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Emi Agustini, S.H., LL.M.
2.	Jenis Kelamin	Pemerian
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198303102008342001
5.	NIDN	0010088302
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Suraheya, 10 Agustus 1983
7.	E-mail	emi@flunsak.ac.id
8.	HP	08113463765
9.	Alamat Kantor	Jalan Dharmawangsa Dalam, Suraheya
10.	No. Telepon/Fax	(031) 8033151 / (031) 5000454
11.	Mata Kuliah yg diajari	1. Hukum Perdata 2. Hukum Waris (Adat, Islam, BKR) 3. Hukum Kontrak 4. Perancangan Kontrak

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	University of Groningen	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	International Comparative and	
Tahun Masuk/Lulus	2001-2005	2008-2010	
Judul Tugas Akhir	Perlindungan Konsumen	The Duty of Good Faith in Pre-contractual Liability (A Comparative Study)	
Nama Pembimbing/Promotor	Usman Iskandar, S.H., M.S.	Dr. G.T. de Jong	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2008	Kontrak Turn-Key Sebagai Salah Satu Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi	PKAT	30.000.000
2.	2012	Perjanjian Pengelolaan Agunan dengan Jaminan real Gantung sebagai Pemeringan Kegiatan Agribisnis	PKAT	
3.	2013	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V/2010 Terhadap Kedudukan Ahli Waris dan Praktik Penghitungan Harta Warisan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia (Hukum Waris Adat, Islam dan Burgelijk Wetboek)	PKAT	
4.	2014	Analisis Risiko dan Penanganannya dalam Proyek Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private Partnership)	PKAT	

3.	2010	Prinsip Debt Forgiveness yang Ditawarkan pada Perjanjian Perdagangan Dalam proses Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	RKAT	
----	------	--	------	--

D. Pengalangan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (JutaRp.)
1.	2018	Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	RKAT	10.000.000,-
2.	2018	Pemmasalahan Hukum Wars dan Solusi Hukum dalam Perspektif Adat, Islam, dan BW	RKAT	13.000.000,-
3.	2018	Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Merek	RKAT	15.000.000,-
4.	2018	Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengrajin Batik di Mojokerto	RKAT	14.500.000,-
5.	2014	Perancangan Kontrak Standar bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	RKAT	18.000.000,-

E. Publikasi Dalam Jurnal Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Komor/Tahun
1.	Karakteristik Kontrak Turn-Key Sebagai Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi	Jurnal Era Hukum	2009
2.	<i>Analyzing Equitable Public-Private Partnership Models on Natural Resources Operations in Indonesia: An Idea to Enhance PPP Scheme in ASEAN</i>	Proceeding International Conference on Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community	2012
3.	<i>Exploring Legal Principles on Government Procurement Law in Indonesia in the Spirit of Preventing and Combating Corruption in South East Asia</i>	Proceeding International Conference on Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community	2012
4.	<i>Pre-nuptial Agreement : A Contemporary Legal Issue in The Spirit Of Globalization in Muslim Law</i>	Contemporary Issues in Matrimonial Property, IUM Press, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012	2012

F. Pengalaman Menentukan Kebijakan Publik/Rakayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat Penetapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-
2.				

Gemilang biodata ini saya buat dengan sejujurnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian dosen pemula.

Surabaya, 24 Oktober 2016
 Anggota Panitia

(Emi Agustia, S.H., LL.M.)

Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Ghuntham Anand, S.H., M.Kn.
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	-
4.	NIP	198401052014041003
5.	NIDN	8607147561
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Paku, 5 Januari 1984
7.	E-mail	ghuntham@fh.uns.ac.id
8.	HP	081332666308
9.	Alamat Kantor	Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya
10.	No. Telepon/Fax	(031) 5023151 / (031) 5026454
11.	Mata Kuliah yg diajari	1. Hukum Acara Perdata
		2. Hukum Perikatan
		3. Hukum Islam
		4. Teknik Acara Peradilan Agama
		5. Lembaga Keuangan Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga
Ridang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Kontrak
Tahun Masuk-Lulus	2001-2006	2006-2008	2008-2013
Judul Tugas Akhir	Waprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pengadaan Rumah Dosen Universitas Tadulako)	Kodudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Sebagai Akta Hapunya Hak Atas Tanah Yang Digunakan	Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Jawabnya
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Syamsuddin Baco, S.H., M.H.	Prof. Dr. M. Iswari, S.H., M.S.	Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum / Prof. Dr. A. Yudha Hamdika, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (JutaRp.)
1.	2015	Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata Indonesia	RKAT	30.000.000
2.	2015	Keebasahan Akta Notaris Tanpa Pembubuhan Stik Jari Pada Minuta Akta	RKAT	30.000.000
3.	2014	Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Buku)	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (JutaRp.)
1.	2015	Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	BOPTN	13.000.000
2.	2015	Permasalahan Hukum Warga dan Solusi Hukum dalam Perspektif Adat, Islam, dan BW	BOPTN	13.000.000
3.	2014	Pemeriksaan Notaris Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang	BOPTN	12.500.000
4.	2014	Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan Syariah di Kota Palu	BOPTN	12.000.000

E. Publikasi Dalam Jurnal Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam	Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Kependataan	Intrans Publishing, Malang, 2014 (ISBN: 978-602-1542-33-7).
2.	Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia	Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER	Volume 1 Nomor 1, Januari – Juni 2015, ISSN: 2442-4090
3.	Urgensi Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pasien (<i>The Urgency of Informed Consent for the Protection of the Rights of Patients</i>) (Penulis bersama Dr. Syafuddin, S.H., M.Hum)	Jurnal Hasanuddin Law Review	Volume 1 Issue 2, August 2015, ISSN: 2442-9880, e-ISSN: 2442-9899

F. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-

Demikian data ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian-dusun penula.

Surabaya, 24 Oktober 2018
Pengusul

(Dr. Ghansyam Anand, S.H., M.Kn.)

Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Fany Livia, S.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	-
4.	NP	-
5.	NDN	-
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Palangkaraya, 26 Januari 1993
7.	E-mail	Fanylivia@gmail.com
8.	HP	082253881688
9.	Alamat Kantor	-
10.	No. Telepon/Fax	-
11.	Mata Kuliah yg ditempu	-
		-
		-
		-

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Airlangga	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Konstitusional	
Tahun Masuk-Lulus	2010-2014		
Judul Tugas Akhir	Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Koperasi Pihak Ketiga		
Nama Pembimbing/Promotor	- Dr. Djoni Gual, S.H., M.Hum. - H. Rachmodi Liman, S.H., M.H.		

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.	-	-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1.				

E. Publikasi Dalam Jurnal Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.			

F. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat	Respon
-----	------------	-------	--------	--------

			Penerapan	Masyarakat
1.				
2.				

Dengan data ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah.

Surabaya, 24 Oktober 2016
Anggota Peneliti

(Fany Levia, S.H.)